



Optimalisasi Pemanfaatan Dana Hibah Program Beasiswa DPRD Kabupaten Sumbawa untuk Pengembangan SDM Daerah

Nurmala Rustianti¹, Muhammad Saleh², Hermansyah³

^{1,2,3}Universitas Teknologi Sumbawa, Indonesia

E-mail: nurmalarustianti001@gmail.co.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-03-12 Revised: 2023-04-10 Published: 2023-05-01 Keywords: <i>Optimization; Utilization Of DPRD Funds; Development Of Regional Human Resources.</i>	<p>This study aims to identify and describe how grant funds are managed for regional human resource development; know the constraints in the use of DPRD grants for regional human resource development; to find out how efforts to optimize the use of grant funds in the development of regional human resources. This research was conducted in the form of a case study on the implementation of the Sumbawa District DPRD grant scholarship program. This study uses descriptive qualitative methods, with data collection techniques through interviews, observation and documentation. The key informants in this study were DPRD leaders and members, community leaders and other related parties. The results of this study indicate that the optimization of the implementation and management of grants from the DPRD of Sumbawa Regency to the budget and the number of outputs of students receiving scholarships has been carried out in accordance with the directives of policies and regulations regarding grant management. to fight for the grants of the people represented in their constituencies, as directed by law. Law Number 17 of 2014 concerning MD3 and DPRRI Regulation Number 4 of 2015 concerning Procedures for Submission of Electoral District Development Programs; The main obstacle in managing DPRD grant funds apart from budgetary issues is the existence of misperceptions by the public towards the concept of grant funds, both in terms of the legal basis or policy direction as well as the form of implementation; Efforts to optimize the use of Grant Funds for regional HR development through strengthening the Scholarship Grant Program are carried out through intensive synchronization by DPRD members and leaders regarding the needs of the people in the constituency to improve education and the quality of education.</p>
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-03-12 Direvisi: 2023-04-10 Dipublikasi: 2023-05-01 Kata kunci: <i>Optimalisasi; Pemanfaatan Dana Hibah DPRD; Pengembangan SDM Daerah.</i>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pengelolaan dana hibah untuk pengembangan sumberdaya manusia daerah; untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan dalam pemanfaatan dana hibah DPRD untuk pengembangan sumberdaya manusia daerah; untuk mengetahui bagaimana upaya optimalisasi penggunaan dana hibah dalam pengembangan sumber daya manusia daerah. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk studi kasus pada pelaksanaan program beasiswa hibah DPRD Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan kunci dalam penelitian ini adalah para pimpinan dan anggota DPRD, tokoh masyarakat dan pihak terkait lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi pelaksanaan dan pengelolaan dana hibah DPRD Kabupaten Sumbawa terhadap anggaran dan jumlah output mahasiswa yang menerima beasiswa telah dilaksanakan sesuai dengan arahan kebijakan dan regulasi tentang pengelolaan dana hibah dalam rangka memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili di daerah pemilihan, sebagaimana arahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan Peraturan DPR selain masalah anggaran adalah adanya mispersepsi masyarakat terhadap konsep dana implementasinya. SDM Daerah dengan penguatan Program Beasiswa Dana Hibah adalah melalui sinkronisasi yang intensif oleh pihak anggota dan pimpinan DPRD terhadap kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan untuk peningkatan Pendidikan dan kualitas Pendidikan.</p>
I. PENDAHULUAN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pasal 373 dijelaskan bahwa	wakil rakyat sebagai pengemban amanat rakyat di DPRD salah satu kewajibannya adalah menyerasap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindak lanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat dan memberikan pertanggung jawaban

secara moral dan politis kepada konstituen. dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3 (Pengganti Undang- Undang Nomor. 27 Tahun 2009), disepakati rumusan yang menegaskan adanya dana aspirasi DPR yang tertuang dalam Pasal 80 huruf j menyebutkan bahwa anggota DPR berhak mengusulkan dan juga memperjuangkan pembangunan daerah pemilihan program. Atas dasar itu, Peraturan DPR Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengajuan Program Pembangunan Daerah Pemilihan. Dalam peraturan ini, dana hibah dapat diusulkan oleh masing-masing anggota DPR atau diusulkan bersama untuk diintegrasikan ke dalam program pembangunan Nasional dalam APBN. Usulan bisa berasal dari inisiatif sendiri, pemerintah daerah, atau hibah masyarakat di daerah pemilihan. Setiap Anggota DPRD hanya mengajukan dana hibah dari daerah pilihannya. Dana Aspirasi tidak disebutkan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dikenal dengan Dana Program Pembangunan Daerah Pemilihan.

Anggota DPRD dalam perwakilannya memiliki daerah pemilihan masing-masing atau yang disingkat dapil. Daerah pemilihan dibagi berdasarkan ruang lingkup atau ruang lingkup daerah tertentu yang telah ditentukan. Setiap Anggota DPRD memiliki tanggung jawab atau kewajiban untuk menjaga hubungan yang erat dengan masyarakat, khususnya masyarakat di daerah pilihannya. Komunitas ini disebut sebagai "konstituen". Konstituen atau pemilih adalah pemberi amanat kepada mereka yang diberi tanggung jawab, masyarakat yang harus diwakili atau kelompok sasaran yang harus dilayani oleh parlemen. Sistem pemilu ini sangat bermanfaat bagi anggota DPRD dan masyarakat, melalui sistem ini lebih jelas terlihat siapa mewakili siapa dan dari daerah mana. Wakil rakyat dapat menyadari bahwa dirinya terpilih karena mewakili rakyat dan daerah tertentu. Sebaliknya, pemilih juga bisa mengetahui siapa yang mewakili dirinya dan daerahnya (Marijan 2010:53). Rizal (2011:8) Secara umum, kegiatan menyerap aspirasi masyarakat oleh anggota dewan dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: Pertama, rapat membahas rencana persiapan reses, menyusun jadwal, materi kegiatan, dan memilih koordinator dan personel struktur tim. Kedua, menghadiri pertemuandengan konstituen di tempat-tempat yang disediakan oleh pemerintah kecamatan atau kecamatan, guna mengkomunikasikan tugas dan peran anggota

DPRD, perannya di legislatif, serta informasi reses dewan kepada daerah pemilihan. Ketiga, silaturahmi dengan masyarakat secara langsung.

II. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang mana pendekatan penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian yakni peneliti bertujuan untuk mendapatkan data yang mendalam dari suatu objek penelitian. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena digunakan sebagai bentuk analisis yang lebih mendalam dan detail, sehingga mampu menghasilkan data yang lengkap dalam mengungkap sebuah fenomena. Penelitian ini dilakukan di Kantor DPRD Kabupaten Sumbawa, jalan lintas sumbawa-bima KM. 5 Sumbawa Besar. Penelitian dilakukan pada tanggal Oktober-November 2022.

Pada penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus (focus grup discussion FGD) dan penyebaran kuesioner (Siyoto & Sodik, 2015). Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah para pimpinan dan juga anggota DPRD, tokoh masyarakat dan pihak terkait lainnya. Sumber data sangat di tentukan oleh metodologi riset kualitatif adalah obeservasi, wawancara dan dokumentasi.

Dalam Penelitian ini Sumber data primer penulis menggunakan wawancara terhadap pimpinan dan juga anggota DPRD Kabupaten Sumbawa serta tokoh masyarakat dan pihak terkait lainnya. Dalam penelitian ini informan Utama (Key), penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan kunci dalam penelitian ini. Informan dalam penelitian ini adalah para pimpinan dan anggota DPRD, tokoh masyarakat dan pihak terkait lainnya. Untuk mempermudah penulis dalam memperoleh data, penulis mengambil jenis wawancara semi terstruktur. Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-dept interview, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan

ide-idenya. Penulis melakukan tanya jawab dengan narasumber yaitu: para pimpinan dan anggota DPRD, tokoh masyarakat dan pihak terkait lainnya mengenai optimalisasi pemanfaatan dana hibah DPRD Untuk pengembangan SDM daerah (Studi Pada Program Beasiswa Hibah DPRD Kabupaten Sumbawa).

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis Triangulasi sumber, yaitu membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda. Penulis mencari dan Menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, Menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Dana Hibah untuk Pengembangan Sumberdaya Manusia Daerah

Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat oleh pemerintah dengan bentuk nilai Hibah yang formulasi dan diharapkan dapat menjadi wadah partisipasi aktif masyarakat dalam proses peningkatan SDM Daerah. Hal tersebut merupakan latar belakang terciptanya inovasi pengelolaan dana hibah untuk pengembangan sumberdaya manusia daerah. Beasiswa hibah ini merupakan bantuan dana hibah dalam bidang pendidikan yang diberikan oleh anggota DPRD Kabupaten Sumbawa kepada kampus-kampus yang ada di kabupaten sumbawa. Karena bersifat hibah, maka nantinya tergantung domisili lembaga masyarakat yang menempuh Pendidikan. sehingga nantinya kampus-kampus yang ada di kabupaten sumbawa melakukan eksekusi dalam pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang terdaftar.

Pelaksanaan program beasiswa hibah DPRD Kabupaten Sumbawa merupakan ide dan gagasan yang di prakarsai oleh anggota DPRD Kabupaten sumbawa yang mengambil peran dalam peningkatan Pembangunan Manusia Khususnya di Kabupaten Sumbawa Dengan adanya inovasi ini, masyarakat kabupaten sumbawa merasa bangga dan menyambut dengan gembira, inovasi dan program baru

dari DPRD Kabupaten Sumbawa ini, karena banyaknya siswa-siswi yang memiliki kemampuan, namun kondisi keuangan mereka yang tidak memungkinkan. Dan hal ini merupakan salah satu cara, agar potensi masyarakat dapat di salurkan dan pemerintah mengambil peran penting dalam penanganan khusus dengan pemberian beasiswa hibah ini.

Beasiswa ini di alokasikan melalui dana hibah anggota DPRD yang prosesnya akan di kumpulkan pada saat masa reses. Anggota DPRD Kabupaten sumbawa menyerahkan langsung kepada SKPD/instansi terkait sehingga beasiswa hibah ini nantinya akan disalurkan kepada mahasiswa/mahasiswi yang membutuhkan atau lolos seleksi dan nantinya akan di anggarkan pada APBD murni maupun perubahan. Pemantauan pada beasiswa hibah ini di pantau oleh beberapa pihak terkait, baik pemerintah maupun masyarakat sekitar. Harapan kedepannya pada saat beasiswa ini di berikan, siswa siswi yang mendapatkan beasiswa mampu bertanggung jawab atas apa yang mereka dapat atau mereka peroleh dengan menjadi mahasiswa yang selalu mempertahankan prestasinya, lulus dengan tepat waktu dengan nilai yang memuaskan, sehingga apa yang di harapkan tercapai. Yaitu meningkatkan SDM khususnya daerah sumbawa dan mampu menciptakan ide-ide atau inovasi dalam memajukan Kabupaten sumbawa kedepannya.

Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) dan Universitas Samawa (UNSA) menjadi salah satu lembaga yang melakukan kerjasama dengan anggota dewan. Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa bersama dinas-dinas terkait merupakan media penyalur dan juga pengawasan hibah serta melakukan kerjasama dengan kampus-kampus tersebut agar tercapainya cita-cita dari pemerintah kabupaten sumbawa dalam menciptakan Pendidikan yang baik sehingga dapat mendongkrak Sumber Daya Manusia (SDM) agar lebih meningkat. Dan berkat dana hibah yang diberikan oleh anggota DPRD Kab. Sumbawa kepada mahasiswa-mahasiswi tersebut, sebagian dari mereka sudah bisa merasakan dan mengenyam Pendidikan di bangku perkuliahan atau universitas.

Sebagaimana data dan informasi yang diperoleh dari wawancara yang ditunjang dengan data hasil observasi dan dokumentasi, menunjukkan bahwa pelaksanaan dan pengelolaan dana hibah DPRD Kabupaten Sumbawa

telah dilaksanakan sesuai dengan arahan kebijakan dan regulasi tentang pengelolaan Dana Aspiarasi dalam rangka memperjuangkan hibah rakyat yang diwakili di daerah pemilihan, sebagaimana arahan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan Peraturan DPR-RI No. 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan;

2. Kendala dan Hambatan Pemanfaatan Dana Hibah untuk Program Beasiswa

Banyak faktor-faktor penghambat yang terjadi dalam pemberian beasiswa ini. Mulai dari keterbatasannya pengetahuan masyarakat setempat tentang program beasiswa hibah, banyaknya protes-protes dari berbagai kalangan sampai dengan proses pencairan dan pendaan yang sering kali terjadi. Program beasiswa hibah ini merupakan bantuan hibah yang diberikan oleh anggota dewan kepada mahasiswa- mahasiswi yang ditunjuk dan di bantu untuk melanjutkan Pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu universitas. Ada beberapa kendala dan hambatan yang sering terjadi Ketika pengurusan berkas dari para calon penerima beasiswa. Mulai dari informasi yang di dapat sangat minim, persyaratan yang belum lengkap. Dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan peneliti bahwa, pada dasarnya pemerintah merupakan pelayan bagi masyarakat, karena hakikat dari pemerintah tidaklah diadakan untuk melayanidirinya sendiri, tapi juga untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan Jurnal Ilmu.

3. Upaya Optimalisasi Penggunaan Dana Hibah DPRD Untuk Program Beasiswa

Pemerintahan dan juga Kebijakan Publik kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama, karenanya DPRD beserta alat kelengkapan berupa PNS sebagai birokrasi public berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan layanan public yang baik dan profesional. Dengan demikian pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan juga tata cara yang telah ditetapkan. Masyarakat semakin berani untuk mengajukan tuntutan keinginan dan inspirasi kepada pemerintah. Masyarakat semakin

kritis untuk melakukan control terhadap apa yang dilakukan pemerintah. Oleh karena itu anggota DPRD kabupaten.

Sumbawa sebagai dasar kewajibannya kepada yang diwakilimerupakan tugas yang sangat besar dalam melayani kepentingan rakyat. Sehingga dapat disimpulkan, dalam melakukan kegiatan baik itu kecil maupun besar, ada beberapa kendala dan hambatan yang pastinya akan kita temukan. beberapa Kendala yang terjadi dalam upaya optimalisasi pemanfaatan dana hibah untuk program beasiswa dana hibah kabupaten sumbawa yaitu:

- a) Ketersediaan Anggaran di APBD murni dan APBD Perubahan
- b) Aturan Penerimaan bagi calon penerima beasiswa

Hambatan-hambatan ini yang menjadi salah satu penyebab terganggunya proses dalam alokasi dana beasiswa hibah di setiap tahunnya, namun, anggota DPRD Kabupaten sumbawa selalu mengoptimalkan anggaran tersebut agar tetap berjalan lancar. Kendala utama dalam pengelolaan dana hibah DPRD selain masalah anggaran adalah adanya mispersepsi masyarakat terhadap konsep dana hibah baik dari sisi dasar hukum atau arahan kebijakan maupun bentuk implementasinya. Untuk mengoptimalkan Dana Hibah harus diupayakan semaksimal mungkin dan dikelola secara akuntabel dan juga transparan agar pengelolaan dana hibah dapat digunakan baik di pembangunan fisik, ekonomi maupun peningkatan mutu pendidikan secara optimal. Dan kedepannya saya sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumbawa berharap langkah kecil ini dapat di manfaatkan oleh masyarakat sehingga dapat terciptanya mutu Pendidikan yang lebih baik.

Pola penyerapan anggaran di kabupaten sumbawa sudah proposional, dalam artian tidak terjadinya penumpukan penyerapan anggaran pada akhir tahun, khususnya dana hibah. Untuk itu strategi optimalisasi tingkat penyerapan anggaran perlunya komitmen yang tinggi dari keseluruhan pengelola anggaran untuk pencapaian kinerja pengelola anggaran. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan bagaimana mengarahkan, mengkonsolidasikan dan mengelola sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan pengoptimalisasian dana hibah untuk program beasiswa hibah. Ada beberapa upaya optimalisasi dalam penggunaan dana hibah DPRD untuk program

beasiswa, salah satunya yaitu, melakukan monitoring dan juga evaluasi, tingkat, permasalahan dan proyeksi peyerapan anggaran hibah. Memastikan prosedur pembayaran kepada penyedia barang ataupun jasa pada awal tahun anggaran. Atau pun melakukan coaching dalam peningkatan sinergi, harmonisasi dan juga Kerjasama dalam pengelolaan anggaran.

Temuan strategi optimalisasi penggunaan dana hibah untuk pengembangan sumber daya manusia daerah, pada pelaksanaan program beasiswa hibah DPRD Kabupaten Sumbawa yaitu:

a) Melakukan seleksi ketat pada tahap pemberkasan

Strategi ini sangat penting dan harus diterapkan dalam pemberian beasiswa agar tepat sasaran. Sehingga anak-anak yang memiliki keterampilan dan prestasi mampu bersaing secara fair atau adil tanpa adanya campur tangan dari pihak luar. Sehingga hasil yang didapatkan juga hasil mutlak dan tidak bisa diubah. Strategi ini juga bisa menjadikan anak-anak berdaya saing dengan mengerahkan segala kemampuannya agar bisa lolos untuk mendapatkan beasiswa.

b) pengajuan proposal beasiswa harus valid

Pengajuan berkas/ proposal yang diajukan oleh siswa-siswi untuk mengikuti atau mendapatkan program beasiswa harus benar-benar real dan valid dibuat dan dibuktikan sendiri oleh pihak pemohon, karena nantinya akan terverifikasi pada proses validasi data. Sehingga diharapkan siswa-siswi yang mengajukan diri untuk program beasiswa melalui penajuan proposal harus kreatif dan teliti. Upaya-upaya ini merupakan implementasi dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mengatasi ancaman-ancaman yang kemungkinan terjadi dimasa mendatang, dan meminimalkan kelemahan yang ada.

Upaya ini sangat bagus diterapkan pada proses optimalisasian dana hibah pada program beasiswa hibah daerah, sehingga terjadinya proses alur yang lancar dan meminimalisir kecurangan. Upaya optimalisasi pemanfaatan Dana Hibah untuk pengembangan SDM daerah dengan cara penguatan Program Beasiswa Dana Hibah adalah melalui sinkronisasi yang intensif oleh pihak anggota dan pimpinan DPRD terhadap kebutuhan masyarakat di daerah

pemilihan untuk peningkatan pendidikan dan kualitas pendidikan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Optimalisasi pelaksanaan dan pengelolaan Dana Hibah DPRD Kabupaten Sumbawa terhadap anggaran dan jumlah output mahasiswa yang menerima beasiswa telah dilaksanakan sesuai dengan arahan kebijakan dan regulasi tentang pengelolaan Dana Hibah dalam rangka memperjuangkan hibah rakyat yang diwakili di daerah pemilihan, sebagaimana arahan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan Peraturan DPR-RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengusulan Program pada Pembangunan Daerah Pemilihan;
2. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana hibah DPRD selain masalah anggaran adalah adanya mis- persepsi masyarakat terhadap konsep dana hibah baik dari sisi dasar hukum atau arahan kebijakan maupun bentuk implementasinya;
3. Upaya optimalisasi pemanfaatan Dana Hibah untuk pengembangan SDM daerah dengan penguatan Program Beasiswa Dana Hibah adalah melalui sinkronisasi yang intensif oleh pihak anggota dan pimpinan DPRD terhadap kebutuhan masyarakat di daerah pemilihan untuk peningkatan Pendidikan dan kualitas pendidikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari analisis dan juga pembahasan pada penelitian ini, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Dari sisi Kebijakan: Diperlukan adanya regulasi khusus yang mengatur tentang pengelolaan dana hibah DPRD, sesuai dengan arahan kebijakan dan peraturan perundangan yang ada. Regulasi ini akan menjadi pedoman bagi DPRD Pemerintah daerah dan pihak terkait dalam pengelolaan danahibah, baik dari segi pengusulan, penganggaran, pelaksanaan dan penata usahaan.
2. Perlu adanya program sosialisasi tentang konsep dan arahan kebijakan dana hibah .
3. Sesuai dengan arahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

untuk dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang legalitas dana hibah.

4. Optimalisasi pemanfaatan dana hibah untuk pengembangan sumberdaya manusia daerah, perlu dilakukan melalui penguatan program beasiswa dana hibah DPRD, melalui sinkronisasi dan komitmen yang kuat baik di internal maupun eksternal DPR dengan ditunjang Sistem Operasional Prosedur (SOP) yang jelas.

DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arriani, Lely. 2010. *Komunikasi Politik Politisi dan Pencitraan di Panggung Politik*. Bandung: Widya Pajajaran.
- "Narsisisme Dana Aspirasi Masyarakat Dalam Penganggaran Daerah: Kajian Etno-Semiotika Berbasis Filsafat Bartsian".
- Asshidiqie, Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia PascaReformasi*, Buana Ilmu Populer, Jakarta, 2008.
- Bako, Ronny Sautma Hotma, *Hak Budget Parlemen Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005.
- Boboy, Max, *DPR RI dalam Perspektif Sejarah dan Tatanegara*, Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Budiarjo, Miryam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cangara, Hafied. 2009. *Komunikasi Politik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Cipto, Bambang. 1995. *DPR dalam Era Pemerintahan Modern-Industrial*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Hanida, Rozi Dateno P. 2010. 'Bentuk Komunikasi Politik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Konstituen di Daerah
- Haris, Syamsudin. 2014. *Partai, Pemilu, dan Parlemen: Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hendriyanto, Rachmad. 2014. 'Analisis Akuntabilitas Politik Reses, Studi Tentang Kegiatan Reses Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah'. *Skripsi*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- I, A. Rahman. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu Handoyo, Eko; Aris Munandar, dan Martien Herna Susanti. 2010. *Etika Politik dan Pembangunan*. Semarang: Widya Karya.
- Kantaprawira, Rusadi. 1999. *Sistem Politik Indonesia: Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Marijan, Kacung. 2010.
- Konstituen Meeting: Mempertemukan Kepentingan Daerah dengan Keterbatasan Wewenang DPD*. Jakarta: YAPPIKA dan MCW.
- Manan, Bagir, *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Marwati, Lilis. 2008. 'Studi tentang Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Papua Dalam Menyikapi Hibah Masyarakat'. *Skripsi*. Universitas Yapis Papua, Papua Politik Pasca-Orde Baru. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, *Bab- Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, 1993.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhtadi, Asep Saiful. 2008. *Komunikasi Politik Indonesia Dinamika Islam*
- Mulyana, Dedi. 2013. *Komunikasi Politik Politik Komunikasi: Membedah Visi dan Gaya Komunikasi Praktisi Politik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Napitupulu, Paimin. 2007. *Menuju Pemerintahan Perwakilan*. Bandung: PT. Alumni. Wibowo, Pramono Anung. 2013. *Mahalnya Demokrasi, Memudarnya Ideologi: Potret Komunikasi Politik Legislator-Konstituen*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Nimmo, Dan. 2005. *Komunikasi Politik (Komunikator, Pesan, dan Media)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Priyanto, AT Sugeng, dkk. 2009. *Buku Ajar Sosiologi Politik*. Semarang: UnnesPress
- Publius, *The Federalist Papers*, New York: New American Library, 1961. Susanto, Mei, *Hak Budget Parlemen Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Putri, Qory Kumala dan M.Y. Tiya Tinov. 2014. 'Efektivitas Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis Periode 2009-2014 (Studi Dapil I Kecamatan Bantan, Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Rupat, dan Kecamatan Rupat Utara)'. Dalam *Pisma*. No. 4. Hal 30-58. Rabbi, Hasni. 2012. 'Hubungan Lembaga Adat Dengan DPRD Dalam Pengambilan Kebijakan Di Kabupaten Tana Toraja'. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Rizal, Afib. 2011. 'Gaya Komunikasi Politik Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah Pada Saat Reses Tahun 2010'. Tesis. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Rozaki, dkk. 2014. *Dari Representasi Simbolik Menuju Representasi Substantif Potret Representasi Konstituensi dan Komunikasi Politik Anggota Dewan Perwakilan Daerah*. Yogyakarta: IRE.
- Salman, Muhammad. 2009. 'Analisis Penyerapan Hibah Masyarakat Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2008'. Tesis. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Sanit, Arbi. 1985. *Perwakilan Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Setyowati, dkk. 2015. *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang*
- Sianturi, Josmagel Harapan. 2014. 'Analisis Terhadap Hubungan Anggota DPRD Dengan Konstituen Di daerah Pemilihannya (Studi Analisis: Kegiatan Masa Reses Anggota DPRD Tapanuli Utara Di Dapil I Pada Tahun 2013)'. *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sitepu, P. Anthonius. 2012. *Studi Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sudarmansyah, Agus., Bakran Suni, dan Asmadi. 2013. 'Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dari Fraksi PDIP Perjuangan Dalam Menyalurkan Hibah Konstituen Di Kabupaten Kubu Raya'. Dalam *Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIP*. No. 1. Hal 1-8.
- Sugiarto, Aries. 2014. 'Sosialisasi Program Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Pada Pemilu Legislatif 2014 Di Kabupaten Rembang'. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Tahun 2015. Semarang: FIS Unnes. Sirajuddin, dkk. 2006. *Membangun*
- Wibowo, Anton Setyo. 2009. 'Peran Anggota DPRD Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Pedasaan (Penelitian Di Kabupaten Jepara)'. *Skripsi*. Universitas Negeri.